

BAB I

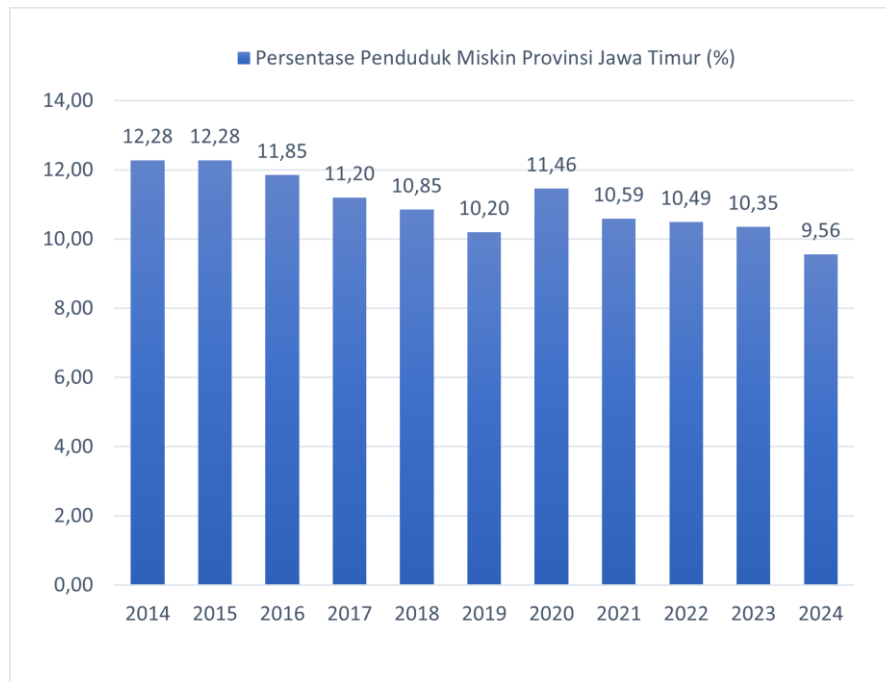
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merujuk pada individu atau kelompok gagal mencukupi kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup serta peningkatan taraf ekonomi secara berkelanjutan. Kebutuhan yang dimaksudkan mencakup kebutuhan dasar (Abram & Yewati, 2021). Tiga kebutuhan penting bagi manusia untuk keberlanjutan hidup. Badan Pusat Statistik (2021) garis kemiskinan merujuk pada derajat ketidakmampuan individu dalam mencukupi ekonomi dasarnya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh banyak hal, termasuk lokasi geografis, komponen budaya dan sosial masyarakat setempat, serta berbagai masalah lain yang mempengaruhinya (Ritonga & Wulantika, 2020).

Kemiskinan mencerminkan sejauh mana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat tersebar merata di kalangan masyarakat. Tanpa pemerataan, pertumbuhan berpusat pada *output* dapat meningkatkan kesenjangan sosial. Kemiskinan adalah masalah struktural yang memerlukan kebijakan jangka panjang untuk menjaga keadilan sosial melalui pemberdayaan manusia, pendidikan, dan peningkatan kesempatan kerja. Badan Pusat Statistik (2025) pada Maret 2023 menjelaskan tingkat kemiskinan nasional berada pada 9,36 persen dengan 26 juta orang penduduk miskin, dengan kemiskinan masyarakat perdesaan tetap lebih tinggi dibandingkan perkotaan. (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018) percaya bahwa pemerintah telah melakukan banyak kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kemiskinan.

Gambar 1. 1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2024



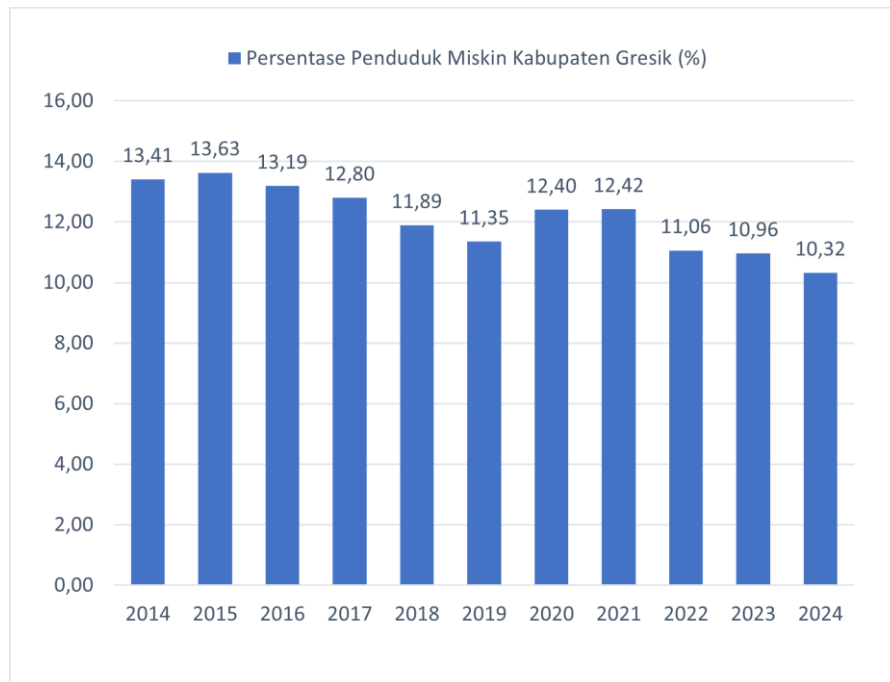
Sumber: (BPS Provinsi Jawa Timur, 2024)

Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki penduduk miskin terbanyak di Indonesia, disebabkan oleh ukuran populasinya yang sangat besar., terus menghadapi masalah kemiskinan yang stabil meski ekonominya sangat kaya. Perbedaan pembangunan antarwilayah yang mencolok, di mana pertumbuhan cepat terjadi di kawasan perkotaan berbanding ketergantungan pedesaan pada sektor pertanian berproduktivitas rendah, mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan berlangsung tidak merata di antara kabupaten/kota. Selain aspek ekonomi, pendidikan dan peluang kerja turut berperan penting dalam memperluas kesenjangan kemiskinan. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan masyarakat pedesaan sulit berkompetisi di pasar kerja.

Pada gambar 1.1, penduduk miskin Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu satu dekade terakhir mengalami kecenderungan penurunan yang konsisten. Pada 2014, tingkat kemiskinan mencapai 12,28 persen dan terus menurun hingga 10,20 persen pada 2019. Namun pada 2020, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur melonjak signifikan menjadi 11,46 persen akibat pandemi. Setelah itu, tingkat kemiskinan terus menurun di angka 9,56 persen pada 2024.

Sebagai pusat industri strategis di Jawa Timur, Kabupaten Gresik menggerakkan ekonomi regional dengan mendominasi manufaktur dan pengolahan dengan lokasi yang ideal. Selain itu, kabupaten tersebut menyeimbangkan potensi sektor kelautan, pertanian, serta UMKM di wilayah pesisirnya. Kabupaten Gresik menampilkan keragaman karakteristik ekonomi yang mencolok., daerah ini masih mengalami kemiskinan walaupun memiliki basis ekonomi yang kuat di industri manufaktur dan pelabuhan. (Fajri, 2025). Profil kemiskinan di wilayah tersebut menunjukkan ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan penyebaran kesejahteraan, dengan sebagian besar masyarakat masih bergantung pada pekerjaan informal atau sektor pertanian. Ketimpangan ini kerap muncul di kecamatan pedesaan yang terpencil dari kawasan industri, di mana akses ke infrastruktur dan kesempatan kerja sangat minim. Garis kemiskinan Kabupaten Gresik cenderung tinggi dari rata-rata provinsi.

Gambar 1. 2 Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2014-2024



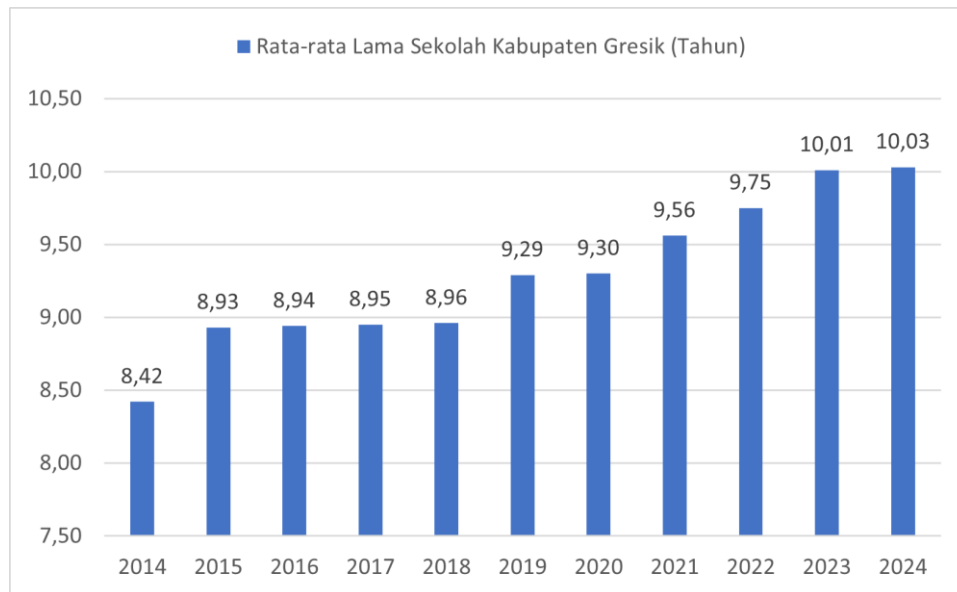
Sumber: (BPS Kabupaten Gresik, 2024)

Pada gambar 1.2 penduduk miskin Kabupaten dalam kurun waktu satu dekade terakhir mengalami kecenderungan penurunan yang konsisten. Pada 2014, tingkat kemiskinan penduduk mencapai 13,41 persen, sebelum kemudian menurun ke angka 11,35 persen pada 2019. Namun, serupa dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur, pada 2020 mengalami peningkatan menjadi 12,40 persen dan terus meningkat lagi menjadi 12,42 persen pada 2021. Pasca pandemi, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengalami tren penurunan secara berturut-turut selama tiga tahun, yakni sebesar 11,06 persen pada 2022, 10,96 persen pada 2023, dan 10,32 persen pada tahun. Namun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik masih relatif tinggi, menempati posisi 12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Data Dinas Sosial Kabupaten Gresik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2020 berada 12,40 persen, lebih di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang 11,90 persen. Hal ini menunjukkan bahwa beban kemiskinan relatif lebih berat pada tingkat kabupaten dibandingkan dengan kondisi provinsi secara keseluruhan. (Arfah, 2021).

Pendidikan memainkan peran krusial dalam upaya mitigasi kemiskinan, sebab menjadi fondasi utama bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lewat proses pendidikan, individu mengakuisisi pengetahuan, kompetensi, serta sikap esensial guna turut serta secara efektif dan produktif dalam dinamika kegiatan ekonomi. Akses terhadap pendidikan yang layak memungkinkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk memutus rantai kemiskinan, melalui penguatan kemampuan kerja serta perluasan kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sering kali, keterbatasan ekonomi pada keluarga kurang mampu menghambat pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak, yang pada akhirnya memunculkan ketimpangan akses pendidikan antar strata sosial-ekonomi, khususnya pada tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi. (Wahyono, 2023).

Gambar 1. 3 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2014-2024

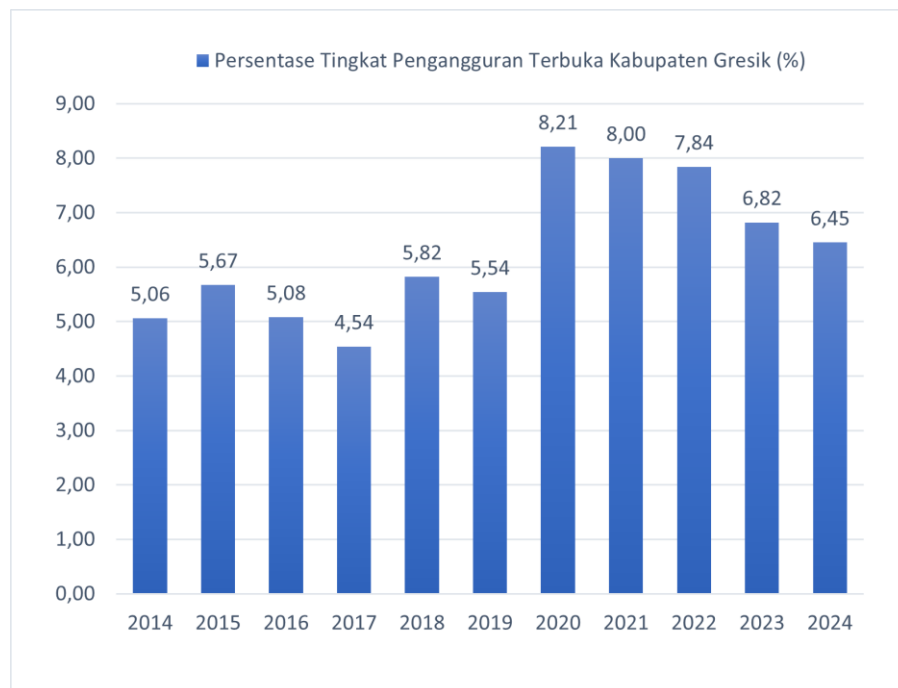


Sumber: (BPS Kabupaten Gresik, 2024)

Pada gambar 1.3 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik dalam satu dekade terakhir mengalami tren kenaikan. Dari tahun 2014 hingga 2024, terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 1,61 persen. Data tersebut mengindikasikan adanya kemajuan yang signifikan dalam kondisi pendidikan di Kabupaten Gresik sepanjang beberapa tahun belakangan ini. Bersamaan dengan bertambahnya perhatian pemerintah terhadap ranah pendidikan, ketimpangan antarwilayah antara daerah pedesaan dan perkotaan tetap tampak nyata, terutama dalam hal ketersediaan sarana prasarana, mutu tenaga pengajar, serta dukungan finansial keluarga terhadap pendidikan anak. Industri manufaktur skala besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Gresik kerap kali mewajibkan tenaga kerja dengan kualifikasi minimal lulusan SMK jurusan teknik yang telah kompeten, diploma, maupun sarjana.

Tingkat pendidikan yang rendah cenderung memicu pengangguran, yang pada gilirannya menjadi salah satu pendorong utama kemiskinan. Pengangguran berkepanjangan cenderung merusak keterampilan individu dan menurunkan tingkat produktivitasnya, yang pada gilirannya memperparah tantangan dalam mendapatkan pekerjaan baru. Di Kabupaten Gresik, meskipun sektor industri dan aktivitas ekonomi mengalami perkembangan pesat, tidak seluruh kalangan masyarakat dapat menjangkau peluang kerja yang ada akibat kendala pada tingkat pendidikan dan kompetensi keterampilan. Hal ini telah menyebabkan ketimpangan antara laju pertumbuhan ekonomi regional dan kemampuan masyarakat setempat untuk memanfaatkannya, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan kemiskinan.

Gambar 1. 4 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik Tahun 2014-2024

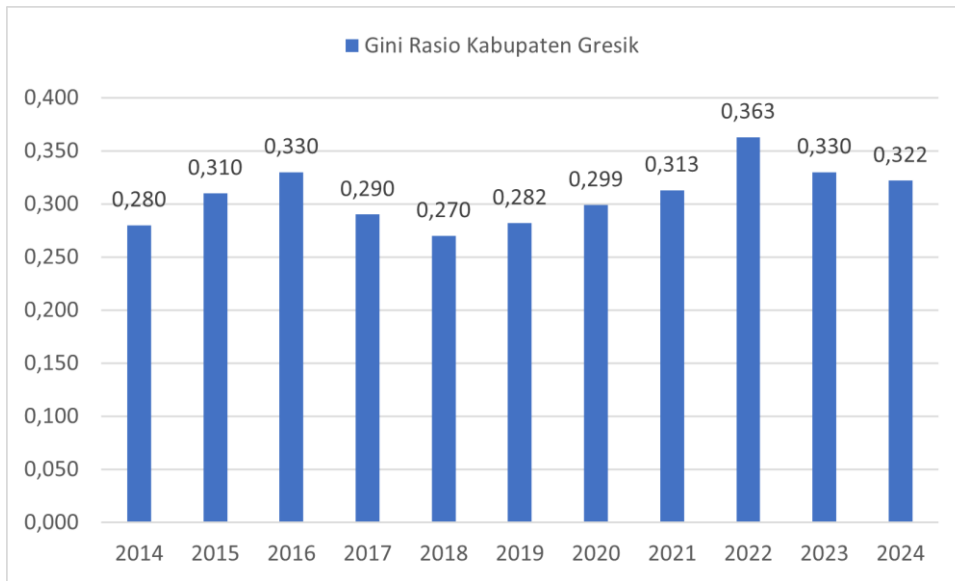


Sumber: (BPS Kabupaten Gresik, 2024)

Gambar 1.4 menunjukkan lonjakan tajam pada tingkat pengangguran terbuka (TPO) pada tahun 2020, yang mencapai puncaknya sebesar 8,21 persen. Kenaikan ini dipicu oleh gelombang PHK massal di berbagai sektor industri, yang disebabkan oleh pembatasan ketat terhadap aktivitas ekonomi selama pandemi. Situasi ini menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi banyak orang, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gresik. Meskipun tanda-tanda pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022, tingkat pengangguran pada tahun 2024 yang masih berada di angka 6,45 persen tetap jauh lebih tinggi daripada tingkat sebelum tahun 2018. Ketidakmampuan sebagian anggota masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak telah mengakibatkan terkonsentrasinya pendapatan pada segelintir kelompok tertentu, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mengarah pada distribusi kemakmuran yang merata. Akibatnya, ketimpangan pendapatan semakin parah, disertai dengan terbatasnya akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi lainnya.

Ketidakmerataan pendapatan, sebagaimana tergambar dalam nilai Gini Rasio secara langsung memengaruhi tingkat kemiskinan. Rumah tangga di lapisan terbawah menghadapi tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan jika ada peningkatan ketimpangan. Dalam kasus ini, pemerataan hasil pembangunan tidak otomatis sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sementara beberapa kelompok kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sebagian lainnya dapat menikmati kenaikan pendapatan yang signifikan. Situasi seperti ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang lebih rumit dan memperlebar kesenjangan sosial ekonomi.

Gambar 1. 5 Grafik Gini Ratio Kabupaten Gresik Tahun 2014-2024



Sumber: (BPS Kabupaten Gresik, 2024)

Pada gambar 1.5 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan indikator Gini Ratio di Kabupaten Gresik selama 2014-2024. Nilai awal Gini Ratio berada di angka 0,280 yang kemudian mengalami fluktuasi sebelum mencapai 0,322 pada tahun 2024. Di Kabupaten Gresik, ada perbedaan pendapatan yang signifikan antar wilayah, yang berkontribusi pada ketimpangan pendapatan yang ada. Dibandingkan dengan daerah pinggiran seperti Kecamatan Sidayu dan Kedamean, pusat industri di Kecamatan Manyar dan Gresik Kota, yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi. Fenomena ini menciptakan pola antara kaya dan miskin wilayah industri memiliki banyak peluang ekonomi, sementara wilayah pinggiran menghadapi infrastruktur, pasar, dan layanan publik yang terbatas. (Firda, 2025). Meskipun Gini Ratio Kabupaten Gresik agak rendah, ketimpangan horizontal akan mempertahankan tingkat kemiskinan di 10,32 persen atau 142.390 orang pada tahun 2024. Dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,58 persen, sebagian

besar penduduk jauh di garis kemiskinan sebesar Rp.608.828 per bulan. (Rofiq, 2024). Kecamatan-kecamatan yang berbasis agraris-perikanan sering menghadapi ketertinggalan infrastruktur dan akses ekonomi, tetapi kecamatan-kecamatan di pusat industri memiliki perputaran uang yang sangat besar. Disparitas ini memperparah ketimpangan pendapatan kabupaten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?
3. Apakah ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini berfokus pada tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, serta tingkat pendidikan (RLS), pengangguran (TPT), dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) sebagai variabel independen.
2. Data yang digunakan adalah data tahunan periode 2010 hingga 2024 untuk menangkap dinamika sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19.
3. Data tahunan periode 2010-2024 adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik dan BPS Provinsi Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji variabel ekonomi makro di Kabupaten Gresik dengan cakupan data terbaru.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang inklusif.